

Analisis Implementasi Kebijakan Kerja Sama Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu di Provinsi Banten Tahun 2018 = Policy Implementation on Blood Services Cooperation Among Community Health Center (CHC), Blood Transfusion Center (BTC) and Hospitals to Decrease MMR in Banten Province, 2018

Aderia Rintani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20495051&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategi pemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaan darah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjangan implementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun 2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015 menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan, lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegon yang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal ini karena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturan kepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitas struktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dan kesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa ada modifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perlu dilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besar efektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI.

<hr>ABSTRACT

The policy implementation on blood service cooperation (Quickwins) is a government strategy to solve the problem of high maternal mortality and limited blood availability in Indonesia. Since it was implemented in 2015, there are still implementation gaps between districts / cities in Banten. This study discusses how and what happened in the implementation of blood service cooperation policy in Banten Province in 2018 in terms of

the ability of technical instructions in Minister of Health Regulation No. 92 of 2015 to structure the implementation process, tractability of the problems, external policy environment, supporting factors and barriers. This research is a qualitative study using indepth interviews, focus group discussions and document review. The criteria of the research informants were elements of the leadership and policy management officers in the Ministry of Health, Banten Provincial Health Office, Cilegon City Health Office, CHC, BTC, and Hospital. The study found that only 1 out of 8 regencies / cities in Banten, namely Cilegon, had a memorandum of understanding (MoU) in accordance with Minister of Health Regulation No. 92 of 2015. This was because the urgency of the MoU was not yet understood, and there were conflicts of interest with other policies. Technical barriers to implementation are the complexity of the implementor structure, the budget for donor recruitment, misperception in the community, and coordination difficulties due to organizational fragmentation. The result concluded that there was a modification in the implementation of the blood service cooperation policy in Banten Province in accordance with the conditions and capacities of each district / city. It is necessary to monitor how far the modifications are made, how effective and whether there is a deviation from the goal. The implementation of a blood service cooperation policy needs to be supported by strengthening the referral system and maternal health services.

<hr>